

LAPORAN TAHUNAN



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB TAHUN 2018



**PENYERAHAN
SERTIFIKAT AKREDITASI
PENJAMINAN MUTU**

4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN SE-INDONESIA

Oleh :

Yang Mulia H. ... mah. Agung



Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2018 selesai disusun. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas atas aktualisasi kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama tahun 2018 kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

Laporan tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2018 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam satu tahun terakhir. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian Informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Pada akhir tahun 2017 lalu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhasil meraih prestasi gemilang yakni sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 November 2017 yang lalu. Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan namun juga sekaligus sebagai cambukan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar dapat terus melaksanakan pelayanan publik dan kinerjanya dimasa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli : "SOKHI" yang berasal dari bahasa daerah Nias. Secara terminologi "SOKHI" memiliki arti "BAGUS", bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sendiri "SOKHI" merupakan akronim dari ; "Santun Objektif Kredibel Harmonis Inovatif".

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2018 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. W2.U/1704/Rpa.01.010/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pembuatan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tahun 2018 serta surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. .

Demikian Laporan Tahunan kegiatan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2018, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih terpacu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum pada tahun 2019, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kepulauan Nias khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Gunungsitoli, 03 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.
NIP 197001231999032002

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar & Diagram	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B	4
D. Budaya Kerja.....	5
E. Motto.....	6
F. Rencana Strategis (RENSTRA)	6
Bab II	
A. Struktur Organisasi (Tupoksi).....	10
1. Standar Operasional Prosedur (SOP)	11
2. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	25
B. Pelayanan Publik yang Prima.....	25
1. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	25
2. Posbakum.....	31
3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	32
4. Perkara Prodeo	34
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan	35
A. Sumber Daya Manusia	35
B. Penyelesaian Perkara.....	37
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	45
D. Pengelolaan Keuangan	46
E. Dukungan Teknologi Informasi	48
E.1 Publikasi Perkara	49
F. Regulasi Tahun 2017.....	56
Bab IV Pengawasan	60
A. Internal	60
B. Evaluasi	61
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah SOP di PN Gunungsitoli	12
Tabel 2. Jumlah SKP di PN Gunungsitoli	25
Tabel 3. Rata-rata Skor Hasil Survei IKM November 2018.....	29
Tabel 4. Penyerapan Anggaran POSBAKUM di PN Gunungsitoli.....	32
Tabel 5. Penyerapan Anggaran Sidang Keliling di PN Gunungsitoli	32
Tabel 6. Penyerapan Anggaran Perkara Prodeo di PN Gunungsitoli	33
Tabel 7. Profil SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan di PN Gunungsitoli	36
Tabel 8. Data Mutasi Aparatur PN Gunungsitoli	36
Tabel 9. Data Promosi Aparatur PN Gunungsitoli	36
Tabel 10. Data Pensiun Aparatur PN Gunungsitoli.....	37
Tabel 11. Data Diklat Aparatur PN Gunungsitoli	37
Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2018.....	38
Tabel 13. Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tahun 2018.....	38
Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	38
Tabel 15. Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu	38
Tabel 16. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	39
Tabel 17. Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	39
Tabel 18. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi	40
Tabel 19. Jumlah Perkara Pidana yang Berhasil Diversi.....	40
Tabel 20. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2018.....	43
Tabel 21. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2018	43
Tabel 22. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2018	44
Tabel 23. Keadaan Perkara Perdata yang Diajukan Upaya Hukum Tahun 2018	44
Tabel 24. Keadaan Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2018.....	44
Tabel 25. Keadaan Perkara Perdata yang Diajukan Somasi Tahun 2018.....	44
Tabel 26. Keadaan Perkara Perdata Konsignasi Tahun 2018	45
Tabel 27. Pengadaan Tahun 2018.....	45
Tabel 28. Pemeliharaan Tahun 2018.....	45
Tabel 29. Penghapusan Tahun 2018.....	45
Tabel 30. Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2018	45
Tabel 31. Keadaan Rumah Dinas Tahun 2018	46
Tabel 32. Realisasi Anggaran DIPA-005.02.01.099896	46
Tabel 33. Belanja Pegawai Tahun 2018.....	46
Tabel 34. Belanja Barang Tahun 2018	47
Tabel 35. Belanja Modal Tahun 2018	47

Tabel 36. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.099198.....	48
Tabel 37. Keadaan Perangkat Keras Tahun 2018.....	48
Tabel 38. Perkara Perdata Permohonan Oneday Publish Tahun 2018.....	49
Tabel 39. Perkara Perdata Gugatan Oneday Publish Tahun 2018.....	54
Tabel 40. Perkara Perdata Gugatan Sederhana Oneday Publish Tahun 2018.....	54
Tabel 41. Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus Oneday Publish Tahun 2018	54
Tabel 42. Perkara Pidana Singkat Oneday Publish Tahun 2018	56
Tabel 43. Perkara Pidana Praperadilan Oneday Publish	56
Tabel 44. Perkara Oneday Publish Tahun 2018.....	54
Tabel 45. Regulasi Tahun 2018 di PN Gunungsitoli	56
Tabel 46. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat.....	60
Tabel 47. Rekapitulasi Pengaduan di PN Gunungsitoli	61

DAFTAR GAMBAR & DIAGRAM

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PN Gunungsitoli Kelas I B.....	10
Gambar 2. Dokumentasi Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Penyerahan Sertifikat Penjaminan Mutu PN Gunungsitoli.....	30
Diagram 1. Jumlah Perkara Pidana Masuk Tahun 2018	41
Diagram 2. Jumlah Perkara Putus, Sisa Perkara dan Berkas Belum Minutasi	41
Diagram 3. Jumlah Terdakwa	42
Diagram 4. Jumlah Berkas Upaya Hukum	42

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. I



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Untuk itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Penyusunan laporan tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib.

Perumusan suatu kebijakan umum sangat memerlukan pedoman yang jelas agar setiap kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Beberapa upaya yang telah diuraikan pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap prilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu;

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B juga berpedoman pada kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas. Beberapa program prioritas tersebut, yaitu :

1. Program tunggakan minutasi nihil untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara;
2. Program sistem pelayanan satu pintu (*one stopintergrated service*) atau dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan persidangan. Dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Program keterbukaan informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada website Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B “www.pn-gunungsitoli.go.id” serta menggalakkan dan membantu pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan upload putusan ke Direktori Putusan;

4. Program pengembangan sistem pengadilan yang akuntabel dan transparan dengan mengoptimalkan meja pelayanan terpadu serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli Keals I B;
5. Program sidang keliling terpadu “*one day service*” dalam hal memenuhi hak-hak identitas hukum terutama dalam perbaikan nama bagi masyarakat yang kurang mampu;
6. Program e-SKUM (elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar) yaitu aplikasi *web-based* yang dapat membantu para pihak untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara;
7. Program *Audio to Text Recording* (ATR) yaitu aplikasi persidangan pengadilan berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan, sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis terekam dalam bentuk teks. Aplikasi ATR ini sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
8. Pelaksanaan penyelesaian perkara mediasi serta implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sasaran akhir dalam Laporan Tahunan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

- a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”.

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B.

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Seluruh Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
4. Keterbukaan Informasi kepada para Pencari Keadilan.

D. BUDAYA KERJA.

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berprilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh dan taat kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Institusi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bersifat terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan;
15. Tidak menyimpang dan menyalahi prosedur yang berlaku.

Berdasarkan itu juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menerapkan 8 (delapan) Budaya Malu dalam bekerja. Adapun budaya malu tersebut adalah :

1. Malu terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya serta tidak mengikuti apel;
2. Malu tidak masuk kerja tanpa alasan atau keluar pada saat jam kerja;
3. Malu kerja tanpa terprogram, tidak bertanggungjawab dan terbengkalai;
4. Malu bekerja tidak berprestasi;

5. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor;
6. Malu tidak berpakaian rapi, tidak bertatakrama dan tidak berpakaian sopan santun;
7. Malu bermain, merokok dan membuat keributan pada saat jam kerja;
8. Malu tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai dan tidak menjaga kehormatan korps.

E. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B adalah “**SOKHI**” yang dalam bahasa daerah Nias berarti “**BAGUS**” dan merupakan akronim dari “**Santun Objektif Kredibel Harmonis Inovatif**”.

F. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif*.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasankinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara akuntabel, efektif dan efisien.

LAPORAN TAHUNAN



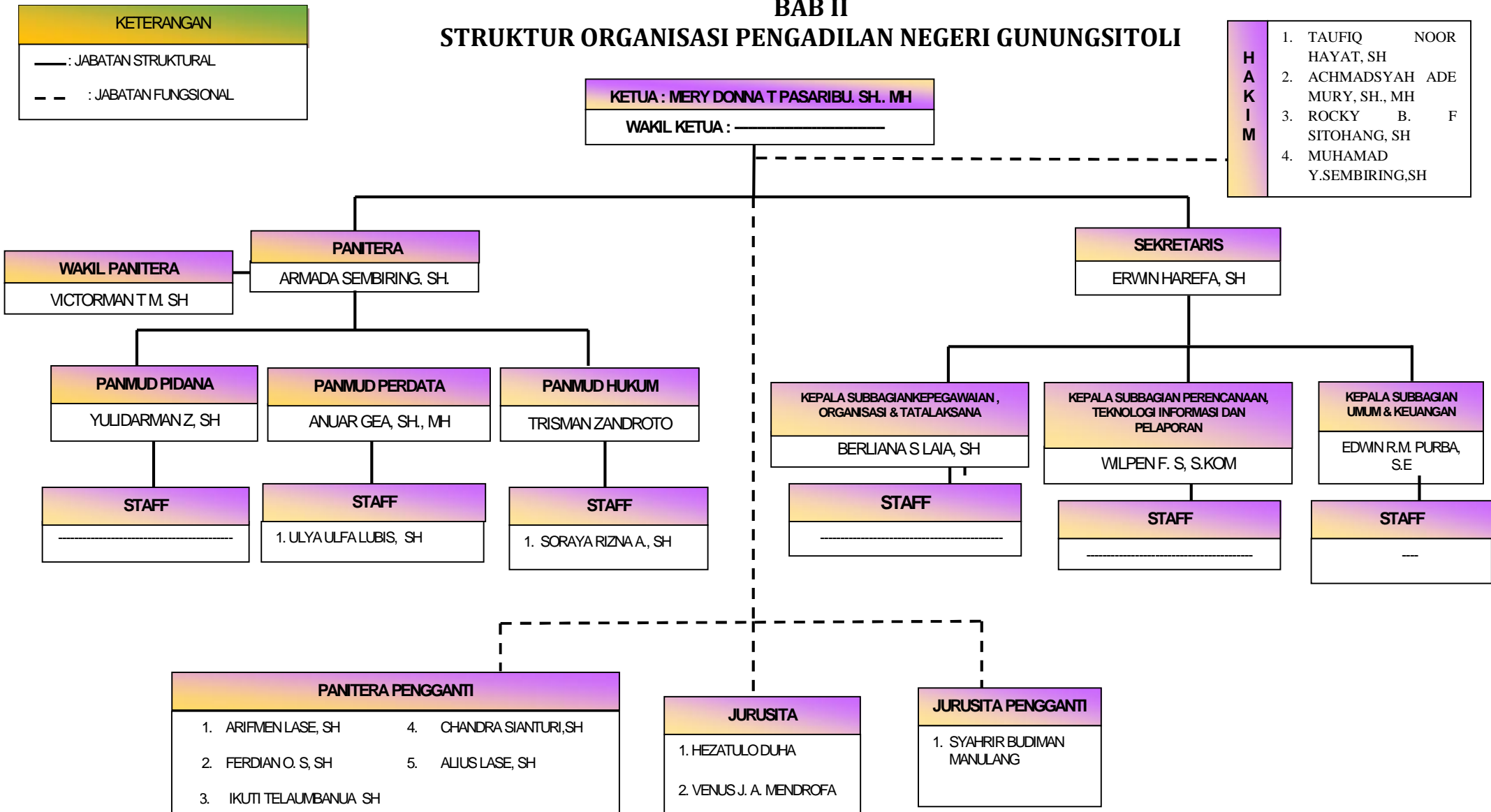
**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. III



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

BAB II STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



A. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP juga dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki tujuan dan fungsi. Beberapa tujuan dari adanya SOP di Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

Sedangkan fungsi dari SOP adalah sebagai berikut:

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan suatu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari empat peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung. Sama halnya seperti organisasi, Pengadilan juga memerlukan SOP untuk memperlancar setiap pekerjaan. SOP harus ada sebelum suatu pekerjaan dimulai, hal ini berguna untuk menilai kelayakan standar pekerjaan yang dilakukan. SOP sebaiknya diuji sebelum dijalankan, dilakukan revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja.

SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Dalam menjalankan operasional pekerjaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar-standar operasi prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi. dalam melaksanakan tugas.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut terdiri dari :

Tabel 1. Jumlah SOP di PN Gunungstoli

No	Jabatan	Jumlah SOP	Terdiri dari	Ket
1	Ketua	39	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pembagian dan uraian tugas Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Sekretaris, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian dan ORTALA; 2. SOP Pembuat penetapan majelis hakim; 3. SOP Penetapan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana, Perdata Permohonan dan Gugatan; 4. SOP Penetapan Hakim Pengawas dan Pengamat; 5. SOP Penetapan Hakim Pengawas Bidang; 6. SOP Penanggung jawab absensi kehadiran Hakim, Pegawai dan Tenaga Sukarela; 7. SOP Penetapan Penegakan Disiplin; 8. SOP Evaluasi laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 	Telah dievaluasi pada tanggal 12 Februari 2018

			<p>Koordinator Pengawas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. SOP Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan <i>court calender</i> penyelesaian perkara; 10. SOP pelaksanaan rapat bulanan; 11. SOP Pelaksanaan rapat dengan para Hakim; 12. SOP Pelaksanaan pengawasan terhadap realisasi dan pelaksanaan DIPA; 13. SOP Penerimaan, membuat disposisi dan membalas surat masuk; 14. SOP Menindaklanjuti setiap pengaduan dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi dan Bawas Mahkamah Agung RI; 15. SOP Membuat dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan; 16. SOP Menandatangani dan memaraf register perkara; 17. SOP Menandatangani keuangan perkara perdata; 18. SOP Menandatangani permintaan dan pertanggung jawaban remunerasi; 19. SOP Menandatangani perpanjangan penahanan; 20. SOP Membuat dan menandatangani permohonan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Tinggi Medan; 21. SOP Menandatangani laporan permohonan banding, kasasi dan eksekusi; 22. SOP Menerima dan meneliti permohonan eksekusi; 23. SOP Membuat dan menandatangani penetapan aanmaning; 24. SOP Melakukan aanmaning; 	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> 25. SOP Menandatangani SKP, DP3 Hakim, Panitera dan Sekretaris; 26. SOP Menandatangani usul kenaikan pangkat; 27. SOP Menandatangani kenaikan gaji berkala; 28. SOP Menandatangani izin cuti; 29. SOP Menandatangani SK menduduki jabatan; 30. SOP Membuat dan menandatangani SK Jususa Pengganti; 31. SOP Mengambil sumpah dan melantik pejabat struktural dan fungsional; 32. SOP Melakukan pembinaan terhadap bawahan; 33. SOP Melakukan pembinaan terhadap organisasi IKAHI; 34. SOP Melakukan pembinaan terhadap PTWP cabang PN Gunungsitoli; 35. SOP Melakukan pembinaan terhadap Dharmayukti Karini Cabang Gunungsitoli; 36. SOP Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hokum kepada pemerintah daerah; 37. SOP Melakukan koordinasi antar sesama penegak hokum, kepolisian, kejaksaan dan advokat/pensehat hukum; 38. SOP Melakukan monitoring website PN dan SIPP/CTS; 39. SOP Melakukan pelayanan informasi; 	
2	Wakil	-	-	-
3	Hakim	8	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Hakim dalam Persidangan Perkara Perdata Gugatan; 2. SOP Hakim dalam Persidangan Perkara Perdata Permohonan; 3. SOP Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Biasa ; 	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018

			<ol style="list-style-type: none"> 4. SOP Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Cepat; 5. SOP Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Anak; 6. SOP Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Singkat; 7. SOP Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Lalu Lintas/Tilang; 8. SOP Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Praperadilan. 	
4	Panitera	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Membantu Ketua PN membuat program kerja; 2. SOP Penyusunan laporan tahunan; 3. SOP Penyusunan laporan bulanan; 4. SOP Penyusunan laporan 4 bulanan; 5. SOP Penyusunan laporan 6 bulanan; 6. SOP Penunjukan Panitera Pengganti dalam Persidangan; 7. SOP Penunjukan Jurusita; 8. SOP Pengiriman Berkas Perkara Kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI; 9. SOP Pembuatan akta, Salinan putusan, legalisasi surat atau akta, legalisasi surat kuasa dan legalisasi akta badan hokum/cv; 10. SOP Pembuatan Permintaan Delegasi; 11. SOP Pelaksanaan Eksekusi; 12. SOP Peletakan Sita Eksekusi; 13. SOP Penerimaan dan Pembalasan Surat Masuk dan Surat Keluar; 14. SOP monitoring SIPP. 	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018
5	Sekretaris	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan; 2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pegawai; 3. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan; 4. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaa urusan 	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018

			<p>Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;</p> <p>5. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan Rumah Tangga, Keamanan, dan Transportasi;</p> <p>6. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan TI dan Statistik;</p> <p>7. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Dokumentasi serta Pelaporan.</p>	
6	Wakil Panitera	13	<p>8. SOP Penyusunan laporan tahunan;</p> <p>9. SOP Penyusunan laporan bulanan;</p> <p>10. SOP Penyusunan laporan 4 bulanan;</p> <p>11. SOP Penyusunan laporan 6 bulanan;</p> <p>12. SOP Penunjukan Panitera Pengganti dalam Persidangan;</p> <p>13. SOP Penunjukan Jurusita;</p> <p>14. SOP Pengiriman Berkas Perkara Kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI;</p> <p>15. SOP Pembuatan akta, Salinan putusan, legalisasi surat atau akta, legalisasi surat kuasa dan legalisasi akta badan hokum/cv;</p> <p>16. SOP Pembuatan Permintaan Delegasi;</p> <p>17. SOP Pelaksanaan Eksekusi;</p> <p>18. SOP Peletakan Sita Eksekusi;</p> <p>19. SOP Penerimaan dan Pembalasan Surat Masuk dan Surat Keluar;</p> <p>20. SOP monitoring SIPP.</p> <p>NB. Jika Panitera berhalangan melaksanakan tugasnya.</p>	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018
7	Pannmud Perdata	33	<p>1. SOP Penerimaan Perkara Perdata Permohonan;</p> <p>2. SOP Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan;</p> <p>3. SOP Panggilan Sidang Perkara Perdata Permohonan;</p> <p>4. SOP Penanganan Register Perkara Perdata</p>	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018

			Permohonan; 5. SOP Penerimaan Perkara Perdata Gugatan; 6. SOP Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan; 7. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Gugatan; 8. SOP Pemberitahuan Putusan Verstek Perkara Perdata; 9. SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Gugatan/Permohonan Prodeo; 10. SOP Penanganan Berkas Perkara Perdata Gugatan; 11. SOP Penerimaan Berkas Perkara Gugatan Banding; 12. SOP Pendaftaran Perkara Gugatan Banding; 13. SOP Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding; 14. SOP Pencabutan Perkara Gugatan Banding; 15. SOP Pengiriman Berkas Perkara Gugatan Banding; 16. SOP Penerimaan Berkas Perkara Gugatan Kasasi; 17. SOP Pendaftaran Perkara Gugatan Kasasi; 18. SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Perdata Kasasi; 19. SOP Pencabutan Perkara Perdata Kasasi; 20. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan Kasasi; 21. SOP Penerimaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali; 22. SOP Pendaftaran Perkara Perdata Peninjauan Kembali; 23. SOP Pencabutan Perkara Perdata Peninjauan Kembali; 24. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Peninjauan Kembali; 25. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Peninjauan Kembali atas Dasar Novum; 26. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Peninjauan Kembali atas Dasar Kekhilafan	
--	--	--	---	--

			<p>Hukum;</p> <p>27. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;</p> <p>28. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;</p> <p>29. SOP Penerimaan Permohonan Eksekusi;</p> <p>30. SOP Pendaftaran Permohonan Eksekusi;</p> <p>31. SOP Pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi Rill/Pengosongan;</p> <p>32. SOP Penerimaan Konsinyasi;</p> <p>33. SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal;</p>	
8	Panmud Pidana	42	<p>1. SOP Surat Masuk di Kepaniteraan Pidana;</p> <p>2. SOP Surat Keluar;</p> <p>3. SOP Pendaftaran Perkara Pidana Biasa;</p> <p>4. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa;</p> <p>5. SOP Penanganan Berkas Perkara Pidana Biasa;</p> <p>6. SOP Penerimaan Pendaftaran Berkas Pidana Khusus Anak;</p> <p>7. SOP Diversi pada Pengadilan Negeri;</p> <p>8. SOP Persidangan Perkara Khusus Anak;</p> <p>9. SOP Penanganan Berkas Perkara Khusus Anak;</p> <p>10. SOP Pendataan Anak Korban;</p> <p>11. SOP Pendaftaran Penerimaan Berkas Pidana Singkat;</p> <p>12. SOP Persidangan Perkara Pidana Singkat;</p> <p>13. SOP Pendaftaran Perkara Pidana Cepat/Ringan;</p> <p>14. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat/Ringan;</p> <p>15. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Tilang;</p> <p>16. SOP Persidangan Perkara Tilang;</p> <p>17. SOP Penanganan Berkas</p>	Telah dievaluasi pada tanggal 12 Februari 2018

			Perkara Tilang; 18. SOP Berkas Pidana Praperadilan; 19. SOP Penanganan Permohonan Ijin/Persetujuan Penyitaan; 20. SOP Penanganan Permohonan Ijin/Persetujuan Pengeledahan; 21. SOP Permohonan Perpanjangan Penahanan; 22. SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan; 23. SOP Permohonan Diversi dari Penuntut Umum; 24. SOP Penerimaan Barang Bukti; 25. SOP Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengamatan; 26. SOP Pendaftaran Permohonan Banding Pidana; 27. SOP Pernyataan Permohonan Banding; 28. SOP Penerimaan Permohonan Banding Pidana; 29. SOP Penerimaan Memori/Kontra Banding Pidana; 30. SOP Pencabutan Permohonan Banding; 31. SOP Pengiriman Berkas Perkara Banding; 32. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi dari idana; 33. SOP Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara Pidana; 34. SOP Penerimaan Memori/Kontra Kasasi Pidana; 35. SOP Pencabutan Perkara Pidana Kasasi; 36. SOP Pengiriman Berkas Pidana Kasasi; 37. SOP Penerimaan Permohonan PK Perkara Pidana; 38. SOP Pendaftaran Permohonan PK; 39. SOP Pengiriman Berkas	
--	--	--	---	--

			Perkara Pidana PK; 40. SOP Penerimaan Permohonan Grasi; 41. SOP Pengiriman Permohonan Grasi;	
9	Panmud Hukum	23	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk di Kepaniteraan Hukum; 2. SOP Surat Keluar di Kepaniteraan Hukum; 3. SOP Pembuatan Laporan Bulanan; 4. SOP Pembuatan Laporan Caturwulan; 5. SOP Pembuatan Laporan Semester; 6. SOP Pembuatan Laporan Tahunan; 7. SOP Penerimaan Pengaduan; 8. SOP Penanganan Pengaduan; 9. SOP Penyusunan Laporan Triwulan Pengaduan; 10. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Pengaduan; 11. SOP Permohonan Informasi; 12. SOP Penyusunan Laporan Triwulan Informasi; 13. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Informasi; 14. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian; 15. SOP Penanganan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana; 16. SOP Pendaftaran Surat Kuasa ; 17. SOP Layanan Hukum; 18. SOP Kerjasama POSBAKUM; 19. SOP Papan Informasi Perkara; 20. SOP Pengarsipan Berkas Perkara; 21. SOP Legalisasi Surat/Akta; 22. SOP Legalisasi Akta Badan Hukum/CV; 23. SOP Peminjaman Berkas In Aktif. 	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018
10	Panitera Pengganti	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP dalam Persidangan Perkara Pidana Biasa; 2. SOP dalam Persidangan Perkara Pidana Anak; 3. SOP dalam Persidangan Perkara Pidana Cepat; 4. SOP dalam Persidangan 	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018

			<ul style="list-style-type: none"> Perkara Pidana Singkat; 5. SOP dalam Persidangan Perkara Pidana Lalu lintas; 6. SOP dalam Persidangan Perkara Pidana Praperadilan; 7. SOP dalam Persidangan Perkara Perdata Gugatan; 8. SOP dalam Persidangan Perkara Perdata Permohonan; 	
11	Jurusita/ Jurusita Pengganti	6	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Panggilan Sidang; 2. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan; 3. SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali; 4. SOP Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali; 5. SOP Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali; 6. SOP Pemberitahuan Inzage; 	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018
	Non Teknis			
12	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	20	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas; 2. SOP Inventarisasi Pegawai; 3. SOP Daftar Urut Senioritas; 4. SOP Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai; 5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir dan Pegawai Negeri Sipil; 6. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri bagian Kepegawaian; 7. SOP Kenaikan Pangkat; 8. SOP Kenaikan Gaji; 9. SOP Mutasi Hakim; 10. SOP Usul Promosi Jabatan; 11. SOP Usul Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil; 12. SOP Usul Tanda Satya Lencana; 13. SOP Pembuatan SKP; 14. SOP Penyelesaian Surat Tugas; 15. SOP Penyelesaian Permohonan Cuti Hakim dan Pegawai; 16. SOP Penyelesaian 	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018

			Pembuatan Pengantar Hukuman Disiplin bagi Hakim dan PNS; 17. SOP Penyelesaian Pembuatan Pengantar Hukuman Disiplin bagi Hakim dan PNS; 18. SOP Penyelesaian Pembuatan Kartu Pemohon Penambahan Penghasilan (KP4); 19. SOP Penyelesaian Dokumen Pelantikan/Penyumpahahan dan Menduduki Jabatan; 20. SOP Pengusulan TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU.	
13	Kasubag Umum dan Keuangan	10	1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun; 2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK BMN Persemester/Pertahun; 3. SOP Pengelolaan Perpustakaan; 4. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 5. SOP Pengelolaan Surat Masuk; 6. SOP Pengolahan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian); 7. SOP Pengolahan Aplikasi SIMAK BMN (kegiatan harian); 8. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Urusan Umum; 9. SOP Permintaan Barang-Barang Persediaan ; 10. SOP Penyusunan Uraian Tugas Tenaga Satpam dan Petugas Kebersihan Kantor.	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018
14	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	8	1. SOP Perencanaan DIPA; 2. SOP Penyusunan DIPA; 3. SOP Laporan Perencanaan Anggaran; 4. SOP Laporan Penanganan Hardware Pengolah Data Rusak; 5. SOP Pemeliharaan Website; 6. SOP Pengisian dan Pembaharuan Konten Website; 7. SOP SIPP; 8. SOP Laporan Keuangan.	Telah dievaluasi pada tanggal 12Februari 2018

16	Staf	36	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Laporan Bulanan; 2. SOP Pembuatan Laporan Caturwulan; 3. SOP Pembuatan Laporan Semester; 4. SOP Pembuatan Laporan Tahunan; 5. SOP Penerimaan Pengaduan; 6. SOP Penanganan Pengaduan; 7. SOP Permohonan Informasi; 8. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian; 9. SOP Penanganan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana; 10. SOP Pendaftaran Surat Kuasa ; 11. SOP Layanan Hukum; 12. SOP Kerjasama POSBAKUM; 13. SOP Papan Informasi Perkara; 14. SOP Penyusunan Laporan Triwulan Pengaduan; 15. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Pengaduan; 16. SOP Penyusunan Laporan Triwulan Informasi; 17. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Informasi; 18. 19. SOP Penerimaan Berkas Perkara Gugatan Banding; 20. SOP Pendaftaran Perkara Gugatan Banding; 21. SOP Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding; 22. SOP Pencabutan Perkara Gugatan Banding; 23. SOP Pengiriman Berkas Perkara Gugatan Banding; 24. SOP Penerimaan Berkas Perkara Gugatan Kasasi; 25. SOP Pendaftaran Perkara Gugatan Kasasi; 26. SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Perdata Kasasi; 27. SOP Pencabutan Perkara Perdata Kasasi; 28. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan 	Telah dievaluasi pada tanggal 12 Februari 2018
----	------	----	--	--

			<p>Kasasi;</p> <p>29.SOP Penerimaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali;</p> <p>30.SOP Pendaftaran Perkara Perdata Peninjauan Kembali</p> <p>31.SOP Pencabutan Perkara Perdata Peninjauan Kembali;</p> <p>32.SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Peninjauan Kembali</p> <p>33.SOP Penyelesaian Perkara Perdata Peninjauan Kembali atas Dasar Novum;</p> <p>34.SOP Penyelesaian Perkara Perdata Peninjauan Kembali atas Dasar Kekhilafan Hukum;</p> <p>35.SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;</p> <p>36.SOP Penanganan Register Perkara Perdata Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;</p> <p>37.SOP Penerimaan Permohonan Eksekusi;</p> <p>38. SOP Pendaftaran Permohonan Eksekusi;</p> <p>39.SOP Pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi Rill/Pengosongan;</p> <p>40.SOP Penerimaan Konsinyasi.</p>	
--	--	--	---	--

B. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Tabel 2. Jumlah SKP di PN Gunungsitoli

No.	N a m a	Jumlah Kegiatan Tahun 2018	Keterangan
1.	Ketua	2655	Aktif
2.	Wakill Ketua	-	-
3.	Hakim	3475	Aktif
4.	Panitera	2197	Aktif
5.	Sekretaris	499	Aktif
6.	Wakil Panitera	1133	Aktif
7.	Panmud Hukum	4516	Aktif
8.	Panmud Pidana	800	Aktif
9.	Panmud Perdata	2022	Aktif
10.	Kasubag Umum & Keuangan	1735	Aktif
11.	Kasubbag KP dan Ortala	624	Aktif
12.	Kasubbag PTIP	82	Aktif
13.	Jurusita	367	Aktif
14.	Panitera Pengganti	1778	Aktif
15.	Jurusita Pengganti	195	Aktif
16.	Staf Kepaniteraan Hukum	1839	Aktif
17.	Staf Kepaniteraan Perdata	329	Aktif

B. Pelayanan Publik yang Prima

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi penjaminan mutu Indonesia *Court Performance Excellent (ICPE)* merupakan ISO Plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellent (IFCE)* melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standart pengawasan Badan Pengawasan MA dan standart penilaian Direktort Jenderal Badilum tahun 2014.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai dengan standart sertifikasi ISO 9001 : 2008. Tujuan

pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu pada setiap badan Peradilan di Indonesia, khususnya Badan Peradilan Umum adalah untuk mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (*Indonesia Court Performance Excellent-ICPE*).

Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B telah berhasil memperoleh nilai A-Excellent yang diserahkan Dirjen Badan Peradilan Umum di Makassar pada tanggal 28 November 2017. Untuk sampai pada tahap ini, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari unsur Pimpinan sampai dengan tenaga honorer di PN Gunungsitoli. Beberapa langkah tersebut adalah :

Pertama : Pembinaan dan sosialisasi terus menerus. Pembinaan ini berfungsi untuk memastikan semua Hakim dan Pegawai bekerja demi mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*). Pembinaan di PN Gunungsitoli dilakukan secara berkala, untuk pembinaan Hakim Pengawas terhadap Bagian yang diawasinya dilakukan sebulan sekali yakni setiap awal bulan. Rapat bulanan dilakukan setiap awal bulan, rapat khusus Panitera dengan para Panitera Muda dilakukan setiap bulan, demikian juga rapat khusus antara Sekretaris dan para Kasubag dilakukan setiap bulan, serta rapat khusus Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan dengan para tenaga honorer di PN Gunungsitoli yang dilakukan setiap bulan juga.

Kedua : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hakekat akreditasi yaitu pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi. Permulaannya yaitu dengan membentuk Tim Reformasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2000 tentang Grand Design RB, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Ketiga :Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan zona integritas berpedoman pada Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intgritis, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Seyogyanya penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pemerintah daerah.

Keempat pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna. Misalnya meja pelayanan terpadu, ruang sidang anak, ruang ramah anak, ruang tahanan laki-laki dan perempuan, ruang penuntut umum, ruang ibu menyusui, ruang mediasi, ruang kaukus, ruang pengunjung berikut fasilitasnya, ruang tamu terbuka, ruang posbakum, sarana *difable*, tempat parkir pengunjung dan mobil tahanan, serta tempat merokok.

Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Bila DIPA mengalokasikan, lengkapi dengan televisi di ruang pengunjung, CCTV, tabung pemadam kebakaran ringan (apar) dan genset. Tetapi bila belum, maka segera lakukan perencanaan (*strategic planning*) pengadaannya.

Kelima pembenahan administrasi. Acuanya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari sering belum diterapkan dan meja informasi tidak sesuai Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.

Keenam pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, Instruksi Kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Penyusunan SOP berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Seyogyanya tim penyusun SOP adalah unit yang bersangkutan.

Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Badan peradilan umum telah memberikan contoh manual mutu, sehingga penyusunan tinggal menyesuaikan.

Perihal sistem manajemen bekerja dituangkan dalam IK atau SOP. Tapi lebih baik menggunakan IK, karena SOP harus dalam format diagram alir bercabang (*branching flowchart*) sebagaimana ditentukan Persekma No. 002 Tahun 2012, sehingga menyusun IK lebih mudah daripada menyusun SOP. Di PN Gunungsitoli, terdapat 18 (delapan belas) IK, diantaranya IK manajemen representif, IK pengendalian dokumen, IK tinjauan manajemen, IK audit internal dan IK survei kepuasan pengguna.

Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan 5 (lima) kali survei Kepuasan Masyarakat sejak tahun 2016 dan terakhir pada bulan November 2018. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2016 dan 2017 adalah 90 (Sembilan puluh) dalam kategori sangat baik, pada November 2017 nilainya 79,25 (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh lima) termasuk dalam kategori "Baik". Adanya penurunan skor nilai karena jumlah pertanyaan pada survei terakhir lebih sedikit jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan nilai

Kepuasan Masyarakat terhadap 9 (Sembilan) unsur di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sama dengan tahun sebelumnya. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada periode April 2018 memperoleh nilai 92,5 dengan kategori A (sangat baik) dan terakhir pada survei periode November 2018 memperoleh nilai 95 dengan kategori A (sangat baik).

Tabel 3. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode November 2018.

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,69	Sangat Baik	8
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,72	Sangat Baik	7
3.	Waktu Penyelesaian	3,68	Sangat Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,84	Sangat Baik	2
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,75	Sangat Baik	5
6.	Kompetensi Pelaksana	3,795	Sangat Baik	3
7.	Perilaku Pelaksana	3,792	Sangat Baik	4
8.	Sarana dan Prasarana	3,73	Sangat Baik	6
9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,87	Sangat Baik	1

Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaiki atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Kesepuluh audit oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan audit oleh TAPM-Badilum, maka harus meminta audit oleh Pengadilan Tinggi. Rekomendasi

Pengadilan Tinggi harus segera ditindak lanjuti. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap pengadilan tingkat pertama memenuhi syarat untuk dilakukan audit akreditasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan memohon audit akreditasi TAPM Badilum.

Kesebelas audit akreditasi TAPM-Badilum. Semestinya dengan telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, maka akan minim ketidaksesuaian. Nilai A bila mencapai *score* 700-1000, nilai B *score* 500-699, nilai C *score* 300-499 dan nilai D *score* 0-299.

Gambar 2. Dokumentasi Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu PN Gunungsitoli Kelas IB



2. Posbakum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh lembaga peradilan dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama dengan tujuan untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memiliki Posbakum yang bekerjasama dengan LBH Kepulauan Nias. LBH Kepulauan Nias sendiri telah menjalankan tugas dan fungsinya sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan saat ini, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/06/KPN/SK/KP.04.10/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Beberapa layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 25, yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum.

Adapun tatacara pengajuan permohonan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 Pasal 32 yaitu :

- a. Pemohon mengisi formulir dan memberikan persyaratan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (2);
- b. Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara maka petugas posbakum pengadilan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan disidang Pengadilan petugas memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum.

Anggaran yang tersedia pada DIPA 099198 untuk pelaksanaan POSBAKUM sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus rupiah). Penyerapan anggaran Posbakum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli 100%, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4. Penyerapan Anggaran POSBAKUM di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
31.200.000	31.200.000	0

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Peraturan ini juga yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan rangkaian yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pihak terkait. Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan bagian dari Pelayanan Publik yang Prima di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Sidang keliling dilaksanakan bersama dengan Dinas Catatan Sipil Kota Gunungsitoli dan Kantor Camat Kota Gunungsitoli dengan agenda perbaikan kesalahan akta lahir.

Tabel 5. Penyerapan Anggaran Sidang Keliling di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
114.720.000	114.720.000	0

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah aktif sejak tanggal 01 Oktober 2017. Awalnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih dalam bentuk loket-loket. Namun setelah Pelayanan Terpadu di PN Gunungsitoli aktif, maka telah ditetapkan tiga orang petugas di meja layanan terpadu, yakni : petugas untuk Kepaniteraan Pidana, petugas untuk Kepaniteraan Perdata, petugas untuk Kepaniteraan Hukum dan petugas untuk Bagian Umum dan Keuangan.

4. Perkara Prodeo ;

Pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2018 nihil. Sehingga anggaran DIPA yang telah tersedia penyerapannya 0% dikarenakan tidak ada masyarakat yang mendaftar perkara perdata secara prodeo (bebas biaya).

Adapun anggaran perkara prodeo termasuk pada DIPA 099198 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Penyerapan Anggaran Perkara Prodeo di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
3.650.000	0	3.650.000

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSTOLI KELAS I B**

BAB. III



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungstoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

B A B III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Peradilan adalah pegawai dan hakim. Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Wujud konkrit terciptanya integritas dan profesional pegawai di lingkungan pengadilan adalah dengan tercerminnya perilaku yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, kewibawaan dan tanggungjawab.

Sumber Daya Manusia (SDM) di Peradilan Negeri Gunungsitoli masih sangat belum memadai, baik itu sumber daya manusia di bidang teknis maupun sumber daya manusia di bidang non-teknis. Sehingga perlu adanya pembenahan sistem manajemen sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Berikut dijabarkan komposisi sumber daya manusia bidang teknis dan non teknis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

1. Profil Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018.

No.	Jabatan	PANGKAT/GOL. RUANG															
		IV				III				II				I			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Ketua Pengadilan		1														
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hakim							3	1								
4	Panitera	1															
5	Sekretaris							1									
6	Wakil Panitera								1								
7	Panitera Muda Pidana							1									
8	Panitera Muda Perdata								1								
9	Panitera Muda Hukum							1									
10	Panitera Pengganti							4	1								
11	Jurusita					1											
12	Jurusita Pengganti					1							2				
13	Kasubag Umum dan Keuangan							1									
14	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana							1									
15	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan							1									
16	Staf							2									
JUMLAH		1	1			2	8	8	3				2				

Tabel 7. Profil SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

1. Mutasi

Tabel 8. Data Mutasi Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	Jabatan Lama	Hasil Mutasi	Nomor dan Tanggal SK
1	Kennedy P. Sitepu, SH., MH	Hakim pada PN Gunungsitoli	Hakim pada PN Sibuhuan	1926/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 tanggal 26 September 2018
2	Agung C. F D Laia, SH., MH	Hakim PN Gunungsitoli	Hakim pada PN Sei Rampah	1926/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 tanggal 26 September 2018
3	Temaziduhu Harefa, S.H	Panitera PN Gunungsitoli	Panitera PN.Kisaran	2195/DJU/SK/Kp04.5/12/2017 tanggal 11 Desember 2018

2. Promosi

Tabel 9. Data Promosi Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	Jabatan Lama	Promosi	Nomor dan Tanggal SK
1	Achmadsyah Ade Mury, SH., MH	Hakim PN Singkil	Hakim PN Gunungsitoli	1926/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 tanggal 26 September 2018
2	Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, SH	Hakim PN Sidikalang	Hakim PN Gunungsitoli	1926/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 tanggal 26 September 2018
3	Armada Sembiring, SH	Panitera PB Tarutung	Panitera PN Gunungsitoli	2195/DJU/SK/Kp04.5/12/2017 11 Desember 2018

3. Pensiun

Tabel 10. Data Pensiun Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Batas Usia	TMT
	N	I	H	I	L

4. Diklat

Tabel 11. Data Diklat Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Acara
	Teknis				
1	Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H	197001231999032002	Pembina Tk I/ IV b	Ketua PN Gunungsitoli	Diklat Pimpinan Pengadilan XVI.XVII Tahun 2018 di Megamendung-Bogor
	Non Teknis				
1	Erwin Harefa, S.H	197212211993031002	Penata / III c	Sekretaris PN Gunungsitoli	Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XII dan XIII Tahun Anggaran 2018

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus;

Jumlah perkara pidana biasa, khusus, singkat, cepat dan lalu lintas/tilang yang putus pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2018.

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Putus 2018	Sisa Perkara yang Belum Putus 2018
		Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah		
1	Pidana Biasa dan Khusus	33	270	303	292	11
2	Pidana Cepat	0	2	2	2	0
3	Pidana Singkat	0	1	1	1	0
4	Pidana Lalu Lintas	0	6924	6924	6924	0

Jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Jumlah Perkara Perdata yang Putus tahun 2018

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Putus 2018	Sisa Perkara yang Belum Putus 2018
		Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah		
1	Perdata Gugatan	18	50	68	54	14
2	Perdata Gugatan Sederhana	0	1	1	1	0
3	Perdata Permohonan	0	257	257	257	0

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara Pidana yang diputus tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu 2018	Sisa Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
		Sisa 2017	Masuk 2018		
1	Pidana Biasa dan Khusus	33	270	303	0
2	Pidana Cepat	0	0	0	0
3	Pidana Singkat	0	1	1	0
4	Pidana Lalu Lintas	0	6924	6924	0

Jumlah perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu 2018	Sisa Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
		Sisa 2017	Masuk 2018		
1	Perdata Gugatan	18	50	50	4
2	Perdata Gugatan Sederhana	0	1	1	0
3	Perdata Permohonan	0	257	257	0

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara Pidana yang diajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2017	MSK THN 2018	JLH	DIKIRIM	SISA TAHUN 2018	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANDING	1	19	20	15	1	Berkas banding dicabut 4 perkara
2	KASASI	1	8	9	8	0	1 berkas gugur
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	1	1	1	0	Berkas belim kembali
4	GRASI	0	0	0	0	0	-

Berdasarkan data tersebut maka jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sisa perkara pidana biasa tahun 2017 ditambah jumlah perkara pidana biasa tahun 2018 dikurangi jumlah berkas yang diajukan upaya hukum pada tahun 2018 kemudian dijumlahkan dengan berkas banding yang dicabut, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) berkas.

Jumlah perkara perdata yang diajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2017	MSK THN 2018	JLH	DIKIRIM	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	3	11	15	12	2
2	KASASI	1	7	8	8	0
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	1	1	1	0

Berdasarkan data tersebut maka jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sisa perkara perdata gugatan tahun 2017 ditambah jumlah perkara perdata gugatan tahun 2018 dikurangi jumlah berkas yang diajukan upaya hukum pada tahun 2018, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah : 44 (empat puluh empat) berkas.

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Tabel 18. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

No	Sisa Mediasi Tahun Lalu	Perkara Mediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi (2 + 3)	Penyelesaian Mediasi						Mediasi Berjalan (4- (8+9+10))
				Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
				Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (5 + 6 + 7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	31	32	1	0	0	1	30	0	1

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.

Tabel 19. Jumlah Perkara Pidana yang Berhasil Diversi

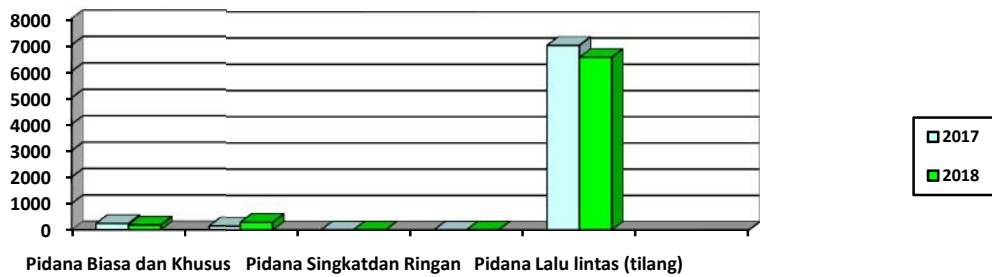
No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara yang Berhasil Melalui Diversi
		Sisa 2017	Masuk 2018	
1	Kesepakatan Diversi	0	5	0

Rekapitulasi perkara yakni menggambarkan keadaan perkara pidana dan perdata yang diterima dan diselesaikan selama tahun 2018. Untuk data lebih lanjut terdapat pada lampiran laporan tahunan ini.

PERKARA PIDANA

Jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang masuk pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang masuk adalah 237 perkara dan pada tahun 2018 naik menjadi 270 perkara. Hal ini menunjukkan tingkat kejahatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli semakin meningkat. Perkara Pidana Singkat pada tahun 2018 masuk satu perkara dengan kualifikasi pencurian. Perkara pidana cepat dan pidana ringan yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 2 perkara. Jumlah perkara pidana lalu lintas (tilang) yang masuk pada tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017. Ini menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas semakin meningkat. Sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut:

Diagram 1. Jumlah Perkara Pidana Masuk 2018



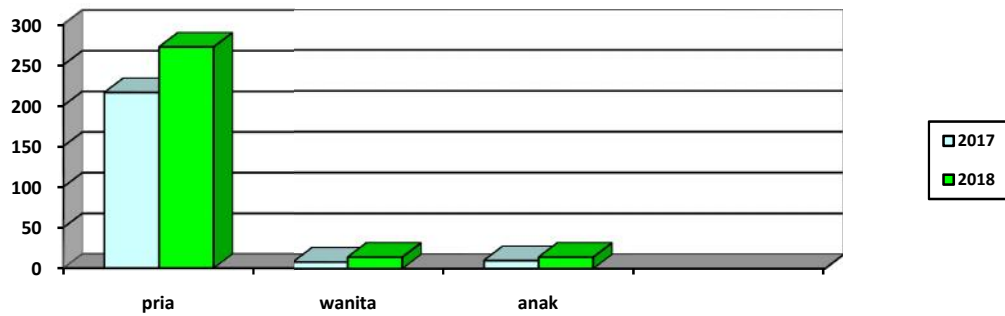
Sedangkan jumlah perkara putus pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun lalu. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang putus yaitu 201 perkara, sedangkan pada tahun 2018 ada 292 perkara yang putus dari 303 jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2018. Jumlah sisa perkara yang ditangani pada tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017. Hal ini dikarenakan manajemen penanganan perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli semakin meningkat. Yakni dengan menerapkan court calender yang membuat data perkara semakin jelas kapan waktu penyelesaiannya. Jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang belum minutasasi pada tahun 2018 menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2017 jumlah perkara yang belum minutasasi 1 perkara, sedangkan 2018 tidak ada lagi berkas perkara yang belum minutasasi. hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli semakin tertib dalam administrasi berkas perkara. Sebagaimana dipaparkan lebih lanjut dalam diagram berikut;

Diagram 2. Perkara putus, Sisa perkara dan Berkas belum Minutasasi



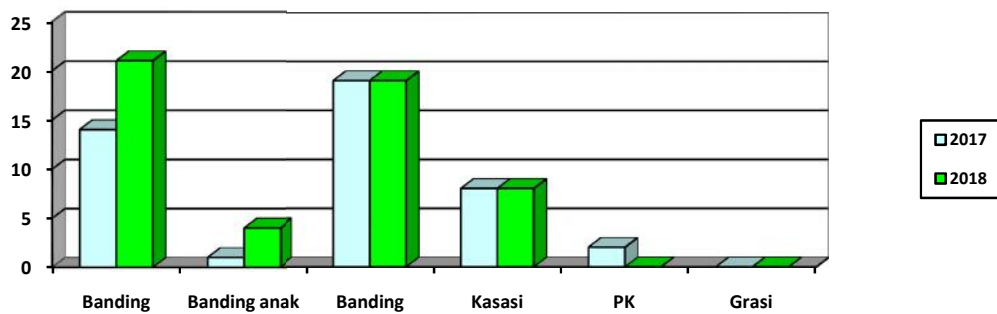
Jumlah terdakwa pada tahun 2018 meningkat yakni sebanyak 300 orang sedangkan pada tahun 2017 jumlah terdakwa sebanyak 283 orang. Hal ini dijabarkan pada diagram berikut:

Diagram 3. Jumlah Terdakwa



Untuk berkas pidana yang diajukan upaya hukum baik itu banding, kasasi maupun peninjauan kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut:

Diagram 4. Jumlah Berkas yang Diajukan Upaya Hukum



PERKARA PERDATA

Untuk Perkara Perdata tahun 2018 keadaan Perkara Perdata yang masuk menunjukkan grafik yang meningkat dibandingkan dengan 2017. Hal ini terlihat jelas pada rekapitulasi perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli (lihat lampiran terlampir) untuk perkara Perdata Gugatan mengalami penurunan jumlah perkara dan Perkara Perdata Permohonan mengalami peningkatan jumlah perkara yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Untuk perkara perdata Banding dan Peninjauan Kembali mengalami penurunan jumlah perkara, sedangkan Kasasi jumlah perkara masih sama dengan tahun lalu.

Berikut rekapitulasi jumlah perkara perdata dan pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli :

1. Perdata Gugatan

Tabel 20. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2018

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA	MASUK			SISA	MINUTASI		
	PERDATA	THN	THN	JLH	PTS	THN	SISA	JLH	JLH
		2017	2018			2018	LALU	SUDAH	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TANAH	1	2	3	2	1	0	2	0
2	PERUMAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HUTANG PIUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PERSETUJUAN KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SEWA MENYEWAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JUAL - BELI	0	0	0	0	0	0	0	0
8	WARISAN	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERCERAIAN	4	24	30	22	6	0	22	0
10	HARTA PERKAWINAN	0	1	1	0	1	0	0	1
11	GADAI/HIPOTIK	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PERSEROAN	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PERSEKUTUAN ADAT	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SURAT BERHARGA	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ASURANSI	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KEPAILITAN	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEREK	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENYALAHGUNAAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
21	LAIN - LAIN	13	23	36	29	7	0	29	0
	JUMLAH	18	50	68	44	14	0	54	0

C. Perdata Gugatan Sederhana

Tabel 21. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2018

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA	MASUK			SISA	MINUTASI		
	PERDATA	THN	THN	JLH	PTS	THN	SISA	JLH	JLH
		2017	2018			2018	LALU	SUDAH	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WANPRESTASI	0	1	1	1	0	0	1	0
	JUMLAH	0	1	1	1	0	0	1	0

D. Perdata Permohonan

Tabel 22. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2018

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA	MASUK			SISA	MINUTASI		
	PERDATA	THN	THN	JLH	PTS	THN	SISA	JLH	JLH
		2017	2018			2018	LALU	SUDAH	BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)	0	2	2	2	0	0	2	0
2	WALI PENGAMPU	0	3	3	3	0	0	3	0
3	IJIN JUAL	0	11	11	11	0	0	11	0
4	GANTI NAMA	0	8	8	8	0	0	8	0
5	AKTE LAHIR	0	210	210	210	0	0	210	0
6	PENGESAHAN PERKAWINAN	0	1	1	1	0	0	1	0
7	LAIN - LAIN	0	22	22	22	0	0	22	0
	JUMLAH	0	257	257	257	0	0	257	0

E. Upaya Hukum

Tabel 23. Keadaan Perkara Perdata yang Diajukan Upaya Hukum Tahun 2018

NO.	UPAYA HUKUM	SISA	MASUK		DIKIRIM	SISA
		THN	THN	JLH		THN
		2017	2018			2018
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	3	11	14	12	2
2	KASASI	1	7	8	8	0
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	1	1	1	0

Tabel 24. Keadaan Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2018

NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MSK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	EKSEKUSI	19	4	23	3	21

F. SOMASI

Tabel 25. Keadaan Perkara Perdata yang Diajukan Somasi Tahun 2018

NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MSK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	SOMASI	0	0	0	0	0

G. KONSIGNASI

Tabel 26. Keadaan Perkara Perdata Konsignasi Tahun 2018

NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MSK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	KONSIGNASI	1	0	1	0	1

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pengelolaan sarana dan prasarana

a. Pengadaan

Tabel 27. Pengadaan Tahun 2018

Uraian	Realisasi
1	2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Laptop)	38.568.000,-
Jumlah	Rp. 38.568.000,-

b. Pemeliharaan

Tabel 28. Pemeliharaan Tahun 2018

Uraian	Realisasi
1	2
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.233.200,-
Jumlah	Rp. 114.233.200,-

c. Penghapusan

Tabel 29. Penghapusan Tahun 2018

Uraian	Realisasi
1	2
NIHIL	
Jumlah	Rp. 0,-

2. Kendaraan Dinas

Tabel 30. Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2018

No	Uraian	Tahun Perolehan	kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	MiniBus	2005	v			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	YAMAHA	1997			v	
2	HONDA	2005	v			
3	HONDA	2005	v			
4	HONDA	2007	v			
5	HONDA	2008	v			
6	HONDA	2008	v			
7	HONDA	2008	v			
8	HONDA	2008	v			

3. Rumah Dinas

Tabel 31. Keadaan Rumah Dinas Tahun 2018

No	Nama Barang	Luas	Keterangan
1	2	3	4
1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
3	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	144	Kantor
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	317	Kantor
7	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	100	Teluk Dalam Nias Selatan
8	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	100	Pulau Tello Nias Selatan
	Jumlah		

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696/2018 T.A 2018 Tanggal 05 Desember 2017

Tabel 32. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696 Tahun 2018

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	2.675.711.000	2.723.216.049	-47.505.049	101,78
52	Belanja Barang	814.273.000	809.621.300	4.651.700	99,42
53	Belanja Modal	39.000.000	38.568.000	432.000	98,89

1.A.1 Belanja Pegawai

Tabel 33. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.052.105.000	1.051.105.800	709.800	99,93
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	16.754	6.246	72,84
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	83.697.000	83.998.420	-301.420	100,36
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	27.181.000	27.192.658	-11.658	100,04
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.940.000	36.940.000	0	100,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.002.830.000	1.051.510.000	-48.680.000	104,85
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	114.148.000	124.100.637	-9.952.637	108,72
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	58.500.000	64.381.380	-5.881.380	110,05
511129	Belanja Uang Makan PNS	234.432.000	208.301.000	26.131.000	88,85
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5.055.000	5.180.000	-125.000	102,47
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	60.800.000	70.200.000	-9.400.000	115,46

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2018 senilai Rp. 2.723.216.049,- atau 101,78%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 naik dibandingkan

realisasi Tahun 2017 senilai Rp. 2.541.400.180,- hal ini dikarenakan adanya kenaikan kelas Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjadi Kelas I B dan karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB telah termasuk satker yang mendapatkan tunjangan kemahalan hakim.

1.A.2 Belanja Barang

Tabel 34. Realisasi Belanja Barang Tahun 2018

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	227.276.000	234.549.435	4.126.565	98,27
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	55.148.000	52.968.800	2.179.200	96,05
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.020.000	10.019.000	1.000	99,99
522111	Beban Langganan Listrik	68.400.000	57.145.065	11.254.935	83,55
522112	Beban Langganan Telepon	1.800.000	1.124.705	1.124.705	62,48
522113	Beban Langganan Air	600.000	0	600.000	0
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	137.100.000	137.100.000	0	100,00
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	46.151.000	46.000.000	151.000	99,67
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124.808.000	114.233.200	7.574.800	93,78
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43.200.000	43.200.000	43.200.000	100,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18.090.000	18.090.000	18.090.000	100,00

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2018 senilai Rp. 809.621.300,- atau 96,74 %. Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 turun dibandingkan realisasi Tahun 2017 senilai Rp. 814.066.036,- . Hal ini dikarenakan turunnya anggaran biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dan pemeliharaan Mesin. Diharapkan agar Tahun 2019 Mahkamah Agung dapat menambah Anggaran Belanja Anggaran Perjalanan Dinas. Untuk Anggaran Perjalanan Dinas Pengadilan Negeri Gunungsitoli sangat kekurangan dikarenakan Jauhnya Jarak antara Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang harus ditempuh dengan perjalanan udara.

1.B.. BELANJA MODAL

Tabel 35. Realisasi Belanja Modal Tahun 2018

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 39.000.000,-	Rp. 38. 568.000,-	Rp. 432.000,-	98, 89 %

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2018 senilai Rp. 38. 568.000,- atau 98, 89 %. Belanja Modal pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2018 yaitu pengadaan 3 (tiga) unit laptop.

2. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198/2018 Tanggal 05 Desember 2017.

Tabel 36. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198 Tahun 2018

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
522131	Beban Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	0	100,00
521211	Belanja Bahan	9.300.000	9.300.000	0	100,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	114.700.000	114.700.000	0	100,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.550.000	6.565.500	3.500	99,96
521211	Belanja Bahan	30.700.000	30.319.000	0	100,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13.000.000	9.026.000	0	100,00
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	17.300.000	14.225.000	200.000	98,84
521211	Belanja Bahan	350.000	0	350.000	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	0	1.500.000	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	400.000	0	400.000	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.400.000	0	1.400.000	0

E.DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan public menuju layanan prima, dengan mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanann yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli:

Perangkat Keras

Tabel 37. Keadaan Perangkat Keras Tahun 2018

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PC UNIT	12	Unit	V			
2	NOTE BOOK	5	Unit	V			
3	SERVER	1	Unit	V			
4	ROUTER MIKROTIK	1	Unit	V			
5	HUB	8	Unit	V			
6	AUDIO VISUAL	2	Unit	V			
7	LCD MONITOR	9	Unit	V			
8	MODEM	1	Unit	V			
9	ACCESS POINT	2	Unit	V			
10	SCANNER	2	Unit	V			

Perangkat Lunak :

- AVG Internet Security

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Sistem Informasi Perpustakaan
- Sistem Informasi Persuratan (PTSP)
- Sistem Informasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

E. 1. Publikasi Perkara (*One Day One Publish*)

Publikasi perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan melalui aplikasi SIPP Perkara dan melalui aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung RI. Beberapa putusan yang di publikasikan (*One day publish*) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 38. Perkara Perdata Permohonan Oneday Publish Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Tanggal Publikasi
1	1/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 12 Jan. 2018	Jumat, 12 Jan. 2018
2	2/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 12 Jan. 2018	Jumat, 12 Jan. 2018
3	3/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 12 Jan. 2018	Jumat, 12 Jan. 2018
4	4/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 12 Jan. 2018	Jumat, 12 Jan. 2018
5	5/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 22 Jan. 2018	Senin, 22 Jan. 2018
6	7/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 08 Feb. 2018	Kamis, 08 Feb. 2018
7	8/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 14 Feb. 2018	Rabu, 14 Feb. 2018
8	9/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 15 Feb. 2018	Kamis, 15 Feb. 2018
9	13/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 06 Mar. 2018	Selasa, 06 Mar. 2018
10	18/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 20 Apr. 2018	Jumat, 20 Apr. 2018
11	19/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 13 Apr. 2018	Jumat, 13 Apr. 2018
12	23/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 02 Mei. 2018	Rabu, 02 Mei. 2018
13	26/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 23 Apr. 2018	Senin, 23 Apr. 2018
14	30/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 04 Mei. 2018	Jumat, 04 Mei. 2018
15	31/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 28 Mei. 2018	Senin, 28 Mei. 2018
16	32/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 28 Mei. 2018	Senin, 28 Mei. 2018
17	33/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 28 Mei. 2018	Senin, 28 Mei. 2018
18	34/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 28 Mei. 2018	Senin, 28 Mei. 2018
19	35/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 03 Mei. 2018	Kamis, 03 Mei. 2018
20	38/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 15 Mei. 2018	Selasa, 15 Mei. 2018
21	39/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 05 Jun. 2018	Selasa, 05 Jun. 2018
22	42/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 18 Mei. 2018	Jumat, 18 Mei. 2018
23	44/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 28 Mei. 2018	Senin, 28 Mei. 2018
24	45/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 28 Mei. 2018	Senin, 28 Mei. 2018
25	47/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 05 Jun. 2018	Selasa, 05 Jun. 2018
26	49/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 04 Jun. 2018	Senin, 04 Jun. 2018
27	51/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 04 Jun. 2018	Senin, 04 Jun. 2018
28	52/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 31 Mei. 2018	Kamis, 31 Mei. 2018

29	53/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 08 Jun. 2018	Jumat, 08 Jun. 2018
30	54/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 08 Jun. 2018	Jumat, 08 Jun. 2018
31	55/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 08 Jun. 2018	Jumat, 08 Jun. 2018
32	56/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 08 Jun. 2018	Jumat, 08 Jun. 2018
33	57/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 08 Jun. 2018	Jumat, 08 Jun. 2018
34	58/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 04 Jul. 2018	Rabu, 04 Jul. 2018
35	59/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 04 Jul. 2018	Rabu, 04 Jul. 2018
36	60/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 06 Jul. 2018	Jumat, 06 Jul. 2018
37	61/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 09 Jul. 2018	Senin, 09 Jul. 2018
38	62/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 09 Jul. 2018	Senin, 09 Jul. 2018
39	65/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 16 Jul. 2018	Senin, 16 Jul. 2018
40	66/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 16 Jul. 2018	Senin, 16 Jul. 2018
41	67/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 16 Jul. 2018	Senin, 16 Jul. 2018
42	68/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 16 Jul. 2018	Senin, 16 Jul. 2018
43	71/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 20 Jul. 2018	Jumat, 20 Jul. 2018
44	72/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 20 Jul. 2018	Jumat, 20 Jul. 2018
45	73/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 20 Jul. 2018	Jumat, 20 Jul. 2018
46	75/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 30 Jul. 2018	Senin, 30 Jul. 2018
47	76/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 27 Jul. 2018	Jumat, 27 Jul. 2018
48	77/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 27 Jul. 2018	Jumat, 27 Jul. 2018
49	78/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 30 Jul. 2018	Senin, 30 Jul. 2018
50	79/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 27 Jul. 2018	Jumat, 27 Jul. 2018
51	80/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 27 Jul. 2018	Jumat, 27 Jul. 2018
52	81/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 03 Agu. 2018	Jumat, 03 Agu. 2018
53	82/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 03 Agu. 2018	Jumat, 03 Agu. 2018
54	83/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 03 Agu. 2018	Jumat, 03 Agu. 2018
55	84/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 06 Agu. 2018	Senin, 06 Agu. 2018
56	85/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 03 Agu. 2018	Jumat, 03 Agu. 2018
57	86/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 03 Agu. 2018	Jumat, 03 Agu. 2018
58	87/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 09 Agu. 2018	Kamis, 09 Agu. 2018
59	88/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 09 Agu. 2018	Kamis, 09 Agu. 2018
60	89/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 13 Agu. 2018	Senin, 13 Agu. 2018
61	90/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 10 Agu. 2018	Jumat, 10 Agu. 2018
62	91/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 20 Agu. 2018	Senin, 20 Agu. 2018
63	92/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 20 Agu. 2018	Senin, 20 Agu. 2018
64	93/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 30 Agu. 2018	Kamis, 30 Agu. 2018
65	94/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 30 Agu. 2018	Kamis, 30 Agu. 2018
66	95/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 30 Agu. 2018	Kamis, 30 Agu. 2018
67	97/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 04 Sep. 2018	Selasa, 04 Sep. 2018
68	98/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 04 Sep. 2018	Selasa, 04 Sep. 2018
69	99/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 06 Sep. 2018	Kamis, 06 Sep. 2018
70	100/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 06 Sep. 2018	Kamis, 06 Sep. 2018
71	101/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 06 Sep. 2018	Kamis, 06 Sep. 2018
72	102/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 06 Sep. 2018	Kamis, 06 Sep. 2018
73	103/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 06 Sep. 2018	Kamis, 06 Sep. 2018
74	105/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 12 Sep. 2018	Rabu, 12 Sep. 2018

75	106/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 27 Sep. 2018	Kamis, 27 Sep. 2018
76	107/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 27 Sep. 2018	Kamis, 27 Sep. 2018
77	108/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 27 Sep. 2018	Kamis, 27 Sep. 2018
78	109/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 27 Sep. 2018	Kamis, 27 Sep. 2018
79	110/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 02 Okt. 2018	Selasa, 02 Okt. 2018
80	111/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 05 Okt. 2018	Jumat, 05 Okt. 2018
81	112/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 02 Okt. 2018	Selasa, 02 Okt. 2018
82	113/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 03 Okt. 2018	Rabu, 03 Okt. 2018
83	114/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 03 Okt. 2018	Rabu, 03 Okt. 2018
84	115/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 04 Okt. 2018	Kamis, 04 Okt. 2018
85	116/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 05 Okt. 2018	Jumat, 05 Okt. 2018
86	117/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 05 Okt. 2018	Jumat, 05 Okt. 2018
87	118/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 05 Okt. 2018	Jumat, 05 Okt. 2018
88	119/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 05 Okt. 2018	Jumat, 05 Okt. 2018
89	120/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 05 Okt. 2018	Jumat, 05 Okt. 2018
90	121/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 18 Okt. 2018	Kamis, 18 Okt. 2018
91	122/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 19 Okt. 2018	Jumat, 19 Okt. 2018
92	123/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 18 Okt. 2018	Kamis, 18 Okt. 2018
93	125/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 18 Okt. 2018	Kamis, 18 Okt. 2018
94	126/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 22 Okt. 2018	Senin, 22 Okt. 2018
95	127/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 22 Okt. 2018	Senin, 22 Okt. 2018
96	128/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 22 Okt. 2018	Senin, 22 Okt. 2018
97	129/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 22 Okt. 2018	Senin, 22 Okt. 2018
98	132/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 23 Okt. 2018	Selasa, 23 Okt. 2018
99	133/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 25 Okt. 2018	Kamis, 25 Okt. 2018
100	134/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 31 Okt. 2018	Rabu, 31 Okt. 2018
101	135/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 31 Okt. 2018	Rabu, 31 Okt. 2018
102	136/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 02 Nov. 2018	Jumat, 02 Nov. 2018
103	137/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 02 Nov. 2018	Jumat, 02 Nov. 2018
104	138/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 02 Nov. 2018	Jumat, 02 Nov. 2018
105	139/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 07 Nov. 2018	Rabu, 07 Nov. 2018
106	140/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 09 Nov. 2018	Jumat, 09 Nov. 2018
107	141/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 09 Nov. 2018	Jumat, 09 Nov. 2018
108	142/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 13 Nov. 2018	Selasa, 13 Nov. 2018
109	143/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 13 Nov. 2018	Selasa, 13 Nov. 2018
110	144/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 13 Nov. 2018	Selasa, 13 Nov. 2018
111	145/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 14 Nov. 2018	Rabu, 14 Nov. 2018
112	146/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 21 Nov. 2018	Rabu, 21 Nov. 2018
113	147 /Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
114	148/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
115	149/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
116	150/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
117	151/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
118	152/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
119	153/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
120	154/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018

121	155/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
122	156/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
123	157/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
124	158/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
125	159/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
126	160/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
127	161/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
128	162/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
129	163/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
130	164/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
131	165/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
132	166/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
133	167/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
134	168/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
135	169/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
136	170/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
137	171/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
138	172/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
139	173/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
140	174/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
141	175/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
142	176/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
143	177/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
144	178/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 30 Nov. 2018	Jumat, 30 Nov. 2018
145	179/Pdt.P/2018/PN Gst	Senin, 03 Des. 2018	Senin, 03 Des. 2018
146	180/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 05 Des. 2018	Rabu, 05 Des. 2018
147	181/Pdt.P/2018/PN Gst	Rabu, 05 Des. 2018	Rabu, 05 Des. 2018
148	182/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis, 06 Des. 2018	Kamis, 06 Des. 2018
149	183/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
150	184/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
151	185/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
152	186/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
153	187/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
154	188/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
155	189/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
156	190/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
157	191/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
158	192/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
159	193/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
160	194/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
161	195/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
162	196/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
163	197/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
164	198/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
165	199/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
166	200/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018

167	201/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
168	202/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
169	203/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
170	204/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
171	205/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
172	206/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
173	207/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
174	208/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
175	209/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
176	210/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
177	211/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
178	212/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
179	213/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
180	214/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
181	215/Pdt.P/2018/PN Gst	Jumat, 07 Des. 2018	Jumat, 07 Des. 2018
182	218/Pdt.P/2018/PN Gst	Selasa, 11 Des. 2018	Selasa, 11 Des. 2018
183	219/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis,13 Des 2018	Kamis,13 Des 2018
184	220/Pdt.P/2018/PN Gst	Kamis,13 Des 2018	Kamis,13 Des 2018
185	221/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
186	222/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
187	223/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
188	224/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
189	225/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
190	226/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
191	227/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
192	228/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
193	229/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
194	230/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
195	230/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
196	231/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
197	232/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
198	233/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
199	234/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
200	235/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
201	236/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
202	237/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
203	238/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
204	239/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
205	240/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
206	241/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
207	242/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
208	243/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
209	244/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
210	245/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
211	246/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
212	247/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018

213	248/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
214	249/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
215	250/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
216	251/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
217	252/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
218	253/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
219	254/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
220	255/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
221	256/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,14 Des 2018	Jum'at,14 Des 2018
222	257/Pdt.P/2018/PN Gst	Jum'at,21 Des 2054	Jum'at,21 Des 2018

Tabel 39. Perkara Perdata Gugatan Oneday Publish Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Tanggal Publikasi
1	45/Pdt.G/2017/PN Gst	24 January 2018	24 January 2018
2	43/Pdt.G/2017/PN Gst	23 April 2018	23 April 2018
3	6/Pdt.G/2018/PN Gst	24 July 2018	24 July 2018
4	10/Pdt.G/2018/PN Gst	17 July 2018	17 July 2018
5	23/Pdt.G/2018/PN Gst	17 July 2018	17 July 2018
6	24/Pdt.G/2018/PN Gst	11 July 2018	11 July 2018
7	11/Pdt.G/2018/PN Gst	05 September 2018	05 September 2018
8	21/Pdt.G/2018/PN Gst	25 September 2018	25 September 2018
9	32/Pdt.G/2018/PN Gst	12 September 2018	12 September 2018
10	26/Pdt.G/2018/PN Gst	03 October 2018	03 October 2018
11	15/Pdt.G/2018/PN Gst	Kamis, 27 Des. 2018	Kamis, 27 Des. 2018
12	42/Pdt.G/2018/PN Gst	Rabu, 21 Nov. 2018	Rabu, 21 Nov. 2018
13	39/Pdt.G/2018/PN Gst	Kamis, 29 Nov. 2018	Kamis, 29 Nov. 2018
14	28/Pdt.G/2018/PN Gst	Kamis, 27 Des. 2018	Kamis, 27 Des. 2018

Tabel 40. Perkara Perdata Gugatan Sederhana One day Publish Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Tanggal Publikasi
1	1/Pdt.G.S/2018/PN Gst	Kamis, 22 Nov. 2018	Kamis, 22 Nov. 2018

Tabel 41. Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus One day Publish Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Tanggal Publikasi
1	1/Pid.Sus/2018/PN Gst	Senin, 19 Feb. 2018	Senin, 19 Feb. 2018
2	4/Pid.Sus/2018/PN Gst	Rabu, 14 Mar. 2018	Rabu, 14 Mar. 2018
3	5/Pid.Sus/2018/PN Gst	Selasa, 27 Feb. 2018	Selasa, 27 Feb. 2018
4	8/Pid.B/2018/PN Gst	Rabu, 21 Feb. 2018	Rabu, 21 Feb. 2018
5	10/Pid.B/2018/PN Gst	Selasa, 13 Mar. 2018	Selasa, 13 Mar. 2018
6	11/Pid.B/2018/PN Gst	Selasa, 27 Feb. 2018	Selasa, 27 Feb. 2018
7	19/Pid.Sus/2018/PN Gst	Senin, 16 Apr. 2018	Senin, 16 Apr. 2018
8	20/Pid.Sus/2018/PN Gst	Senin, 16 Apr. 2018	Senin, 16 Apr. 2018
9	23/Pid.Sus/2018/PN Gst	Senin, 19 Mar. 2018	Senin, 19 Mar. 2018
10	26/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 12 Mar. 2018	Senin, 12 Mar. 2018
11	33/Pid.B/2018/PN Gst	Rabu, 04 Apr. 2018	Rabu, 04 Apr. 2018

12	34/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 09 Apr. 2018	Senin, 09 Apr. 2018
13	35/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 09 Apr. 2018	Senin, 09 Apr. 2018
14	36/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 16 Apr. 2018	Senin, 16 Apr. 2018
15	37/Pid.Sus/2018/PN Gst	Selasa, 10 Jul. 2018	Selasa, 10 Jul. 2018
16	44/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 04 Jun. 2018	Senin, 04 Jun. 2018
17	47/Pid.B/2018/PN Gst	Selasa, 22 Mei. 2018	Selasa, 22 Mei. 2018
18	48/Pid.B/2018/PN Gst	Selasa, 26 Jun. 2018	Selasa, 26 Jun. 2018
19	51/Pid.B/2018/PN Gst	Selasa, 10 Apr. 2018	Selasa, 10 Apr. 2018
20	55/Pid.B/2018/PN Gst	Rabu, 25 Apr. 2018	Rabu, 25 Apr. 2018
21	58/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 04 Jun. 2018	Senin, 04 Jun. 2018
22	60/Pid.Sus/2018/PN Gst	Senin, 21 Mei. 2018	Senin, 21 Mei. 2018
23	153/Pid.B/2018/PN Gst	Rabu, 03 Okt. 2018	Rabu, 03 Okt. 2018
24	152/Pid.Sus/2018/PN Gst	Rabu, 26 Sep. 2018	Rabu, 26 Sep. 2018
25	159/Pid.B/2018/PN Gst	Kamis, 18 Okt. 2018	Kamis, 18 Okt. 2018
26	162/Pid.Sus/2018/PN Gst	Kamis, 18 Okt. 2018	Kamis, 18 Okt. 2018
27	163/Pid.Sus/2018/PN Gst	Kamis, 18 Okt. 2018	Kamis, 18 Okt. 2018
28	164/Pid.Sus/2018/PN Gst	Kamis, 18 Okt. 2018	Kamis, 18 Okt. 2018
29	165/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 29 Okt. 2018	Senin, 29 Okt. 2018
30	170/Pid.B/2018/PN Gst	Jumat, 19 Okt. 2018	Jumat, 19 Okt. 2018
31	171/Pid.B/2018/PN Gst	Jumat, 19 Okt. 2018	Jumat, 19 Okt. 2018
32	172/Pid.B/2018/PN Gst	Jumat, 19 Okt. 2018	Jumat, 19 Okt. 2018
33	172/Pid.B/2018/PN Gst	Jumat, 19 Okt. 2018	Jumat, 19 Okt. 2018
34	173/Pid.B/2018/PN Gst	Jumat, 19 Okt. 2018	Jumat, 19 Okt. 2018
35	177/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 29 Okt. 2018	Senin, 29 Okt. 2018
36	189/Pid.B/2018/PN Gst	Selasa, 30 Okt.2018	Selasa, 30 Okt.2018
37	195/Pid.B/2018/PN Gst	Jumat,02 Nov.2018	Jumat,02 Nov.2018
38	199/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 19 Nov. 2018	Senin, 19 Nov. 2018
39	200/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 19 Nov. 2018	Senin, 19 Nov. 2018
40	201/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 19 Nov. 2018	Senin, 19 Nov. 2018
41	203/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 19 Nov. 2018	Senin, 19 Nov. 2018
42	205/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 19 Nov. 2018	Senin, 19 Nov. 2018
43	206/Pid.B/2018/PN Gst	Senin, 19 Nov. 2018	Senin, 19 Nov. 2018
44	209/Pid.B/2018/PN Gst	Jumat, 23 Nov. 2018	Jumat, 23 Nov. 2018
45	212/Pid.B/2018/PN Gst	Kamis, 22 Nov. 2018	Kamis, 22 Nov. 2018
46	236/Pid.B/2018/PN Gst	Kamis,27 Des 2018	Kamis, 22 Nov. 2018
47	240/Pid.B/2018/PN Gst	Selasa,18 Des 2018	Selasa,18 Des 2018
48	241/Pid.B/2018/PN Gst	Kamis,27 Des 2018	Kamis,27 Des 2018
49	245/Pid.B/2018/PN Gst	Kamis,27 Des 2018	Kamis,27 Des 2018
50	249/Pid.B/2018/PN Gst	Kamis,27 Des 2018	Kamis,27 Des 2018
51	219/Pid.Sus/2018/PN Gst	Selasa,4 Des 2018	Selasa,4 Des 2018
52	224/Pid.Sus/2018/PN Gst	Kamis,6 Des 2018	Kamis,6 Des 2018
53	230/Pid.Sus/2018/PN Gst	Kamis,27 Des 2018	Kamis,27 Des 2018
54	231/Pid.Sus/2018/PN Gst	Kamis,6 Des 2018	Kamis,6 Des 2018
55	248/Pid.Sus/2018/PN Gst	Kamis,27 Des 2018	Kamis,27 Des 2018

Tabel 42. Perkara Pidana Singkat One day Publish Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Tanggal Publikasi
1	1/Pid.S/2018/PN Gst	Senin, 19 Feb. 2018	Senin, 19 Feb. 2018

Tabel 43. Perkara Pidana Praperadilan One day Publish Tahun 2018

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Tanggal Publikasi
1	6/Pid.Pra/2018/PN Gst	Jumat, 08 Jun. 2018	Jumat, 08 Jun. 2018
2	4/Pid.Pra/2018/PN Gst	Rabu, 02 Mei. 2018	Rabu, 02 Mei. 2018
3	1/Pid.Pra/2018/PN Gst	Jumat, 09 Mar. 2018	Jumat, 09 Mar. 2018

F. REGULASI TAHUN 2018

Regulasi merupakan suatu yang disepakati dan mengikat dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Regulasi dalam lingkup Mahkamah Agung dan 4 Peradilan dibawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan, seperti Surat Keputusan Ketua Pengadilan atau kebijakan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah melakukan reformasi birokrasi sepenuhnya sejak semester 2 tahun 2011 lalu. Mahkamah Agung melaksanakan reformasi birokrasi dengan secara strategi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Regulasi diperlukan dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi pada beberapa area penting dalam lingkup pengadilan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan beberapa regulasi pada tahun 2018 yang berkaitan dalam bidang yaitu:

Tabel 44. Regulasi Tahun 2018 di PN Gunungsitoli

No	Surat Keputusan	Nomor SK	Tanggal SK	Yang Menandatangani
1	Penunjukan Tim Akreditasi	11/KPN/SK/KP.04.10/2/2018	12 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
	Penjaminan Mutu	59/KPN/SK/KP.04.10/11/2018	29 November 2018	
2	Penunjukan Tim Audit Internal	2/KPN/SK/KP.04.10/1/2018 62/KPN/SK/KP.04.10/11/2018	08 Januari 2018 29 November 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
3	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	10/KPN/SK/KP.04.10/2/2018 60/KPN/SK/KP.04.10/11/2018	12 Februari 2018 29 November 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
4	Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli	23/KPN/SK/KP.04.10/2/2018	12 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
5	Tim Penilai Role Model/Teladan	25/KPN/SK/KP.04.10/4/2018	02 April 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

6	Penunjukan/Pengangkatan Role Model/Teladan	26/KPN/SK/KP.04.10/4/2018	09 April 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
7	Penunjukan Hakim Pengawas Bidang	8/KPN/SK/KP.04.10/1/2018 55/KPN/SK/KP.04.10/11/2018	12 Februari 2018 29 November 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
8	Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pengamat	17/KPN/SK/KP.04.10/2/2018 58/KPN/SK/KP.04.10/11/2018	12 Februari 2018 29 November 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
9	Pembentukan Tim Manajemen Resiko	W2.U12/1444/KP.04.10/11/2018 56/KPN/SK/KP.04.10/11/2018	12 Februari 2018 29 November 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
10	Pembentukan Tim Pengelola Informasi	21/KPN/SK/KP.04.10/2/2018	12 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
11	Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	12/KPN/SK/KP.04.10/2/2018	12 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
12	Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	06/KPN/SK/KP.04.10/1/2018	22 Januari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
13	Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	04/KPN/SK/KP.04.10/1/2018	08 Januari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
14	Penunjukan Petugas Pengisian Register Perkar Pidana Pada Kepaniteraan Muda Pidana	05/KPN/SK/KP.04.10/1/2018	22 Januari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
15	Penunjukan Tim Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor serta Pengamanan Sidang	19/KPN/SK/KP.04.10/2/2018	12 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
16	Penunjukan Operator Komputer	15/KPN/SK/KP.04.10/2/2018	12 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
17	Penunjukan Petugas Penataan, Pengelola dan pemegang Kunci Perpustakaan	18/KPN/SK/KP.04.10/2/108	12 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
18	Penunjukan Para Pejabat Dan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memakai Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 Milik Pengadilan Negeri Gunungsitoli	22/SEK/SK/KP.04.10/2/108	12 Februari 2018	Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli
19	Penunjukan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian perkara Perdata	W2.U12/252/Kp.04.11/11/2018	2 Februari 2018	Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli
20	Penunjukan Tim Pelaksana Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	16/KPN/SK/KP.04.10/2/2018 57/KPN/SK/KP.04.10/11/2018	12 Februari 2018 29 November 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
21	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Honorarium Tenaga Satpam, Supir, Pramubakti dan Pramusaji	01/SEK/SK/KP.04.10/1/2018 03/SEK/SK/KP.04.10/8/2018	03 Januari 2018 09 Agustus 2018	Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli
22	Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Dan Pengelola Keuangan	W2.U12/30/KU/03.10/III/2018	05 Januari 2018	Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli
23	Penunjukan Penghunian Rumah Dinas/Negeri di Lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli An. Armada Sembiring, S.H	29/SEK/SK/KP.04.10/2/2018	12 Februari 2018	Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli
24	Pembentukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20/KPN/SK/Kp.04.10/3/2018 52/KPN/SK/KP.04.10/10/2018	09 Maret 2018 01 Oktober 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
25	Pembentukan Tim Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)	03/KPN/SK/KP.04.10/1/2018	08 Januari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
26	Pembentukan Tim Penilai Reformasi Birokrasi	12/KPN/SK/KP.04.10/2/2018 61/KPN/SK/Kp.04.10/11/2018	12 Ferbruari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

27	Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kepaniteraan Muda Hukum	24/KPN/SK/KP.04.10/3/2018	29 Maret 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
28	Jadwal Audit Tim Audit Internal	14/KPN/SK/KP.04.10/1/2018	22 Januari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
29	Penetapan Fungsional Umum sebagai Pendamping Panitera Pengganti (Magang)	W2.U12/152/KP.04.10/I/2018	02 Januari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
30	Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	30/KPN/SK/KP.04.10/4/2018	04 April 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
31	Penunjukan Penanggungjawab dan Petugas e-Tilang	28/KPN/SK/KP.04.10/1/2018	08 Januari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
32	Penunjukan Pengawasan dan Operator Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	27/KPN/SK/KP.04.10/1/2018 64/KPN/SK/KP.04.201/11/2018	08 Januari 2018 29 November 2018	Ketua Pengadilan negeri Gunungsitoli
33	Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak) Dan Syarat Teknis Pengadilan Negeri Gunungsitoli	07/KPN/SK/KP.04.10/2/2018	09 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
34	Penunjukan Petugas e-Court Pengadilan Negeri Gunungsitoli	63/KPN/SK/KP.04.10/11/2018	29 November 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
35	Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan	67/KPN/SK/KP.04.10/12/2018	05 Desember 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
36	Penunjukan Penghunian Rumah Dinas/ Negeri di Lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas nama Achmadsyah Ade Mury, SH.MH	4/SEK/SK/KP.04.10.11/2018	01 November 2018	Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli
37	Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)	31/KPN/SK/KP.04.10/2/2018	12 Februari 2018	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. IV



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

B A B IV

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 8/KPN/SK/KP.04.10/1/2018 tanggal 02 Februari 2018 lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 55/KPN/SK/KP.04.10/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat PN Gunungsitoli :

Tabel 45. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Koordinator Pengawas dan Pembinaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim /Penata Tk I (III/d)	Taufik Noor Hayat, SH
2	Pengawas Bidang Pidana	Penata Muda (III/c)	Rocky Belmondo F. Sitohang, SH, MH
3	Pengawas Bidang Perdata	Penata (III/c)	Achmadsyah Ade Mury, SH., MH
4	Pengawas Bidang Hukum	Penata (III/c)	M. Yusup Sembiring, SH
5	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata (III/c)	M. Yusup Sembiring, SH
6	Pengawas bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Penata (III/c)	Achmadsyah Ade Mury, SH., MH
7	Pengawas bidang TI, Pelaporan dan Perencanaan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Rocky Belmondo V. Sitohang, SH, MH

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengavuali hasil kegiatan

3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

B. Pengawasan Evaluasi

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2018 :

Tabel 46. Rekapitulasi Pengaduan di PN Gunungsitoli Tahun 2018

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	-
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	-
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	-
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Pengadilan Tk. Banding	-
6	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	-

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2018 nihil. Untuk jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Bawas Mahkamah Agung RI dan jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah pengaduan yang ditangani, jumlah pengaduan yang telah telah selesai ditangani LHP disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin semuanya nihil.

Adapun evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen peradilan :

- a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan pencapaian target;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor yang mendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Adminitrasi perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;;
 - b. Proedur penerimaan permohonan banding, kasasi, PK dan grasi;
 - c. Keuangan perkara;
 - d. Pemberkasan kearsipan dan pelaporan.
 3. Adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Sistem pembagian perkara;
 - b. Penentuan majelis hakim;
 - c. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - d. Minutasi perkara.
 4. Administrasi umum :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Umum (inventaris barang milik negara, perpustakaan, tata persuratan dan perkantoran serta kebersihan dan keamanan kantor).
 5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan SDM;
 - e. Perawatan dan pemeliharaan inventaris;

- f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
- g. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara;
- h. Tingkat pengaduan masyarakat.

LAPORAN TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**

BAB. V



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
2. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil meraih sertifikat akreditasi penjaminan mutu oleh Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan nilai A (Excellent) yang diserahkan di Makassar pada tanggal 28 November 2017.
3. Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi di dunia peradilan, maka dunia peradilan harus segera memperbaiki kinerja dan berfikir sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan guna terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung;
4. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah diupayakan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum.

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2019 ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berharap ada perbaikan dan penambahan pegawai dan fasilitas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu:

1. Diharapkan agar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli diberikan tambahan hakim dan Pegawai;
2. Diharapkan agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme aparat peradilan.
3. Dimohonkan agar diberikan aset BMN seperti meubelair, printer, mesin genset untuk menunjang lancarnya kegiatan kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Gunungsitoli, 03 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.

NIP 197001231999032002

LAPORAN TAHUNAN



LAMPIRAN

**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS I B**



**Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungstoli
Telp. (0639) 21744 / 21343 - FAX : (0639) 21343**



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NOMOR : W2.U12/ 67 /Kp.04.10/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Laporan Tahunan 2018 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2018;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Pemerintah.

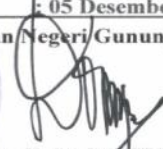
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI:**
- Pertama** : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : W2.U12/ 67 /Kp.04.10/12/2018
Tanggal : 05 Desember 2018

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Dimainkan sebagai
1.	Mery Donna T. Pasaribu, S.H., M.H. NIP. 1977001231999032002	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	Pelindung/Pembina 1
2.	Taufiq Noor Hayat, SH NIP. 197905022002121004	Hakim	Pelindung/Pembina 2
3.	Armada Sembiring, S.H. NIP. 196901231994031003	Panitera	Ketua 1
4.	Erwin Harefa, S.H. NIP. 197212211993031002	Sekretaris	Ketua 2
5.	Victorman T. Mendrofa, S.H. NIP. 197903092000121002	Wakil Panitera	Sekretaris
6.	Trisman Zandroto NIP. 196812291989031002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Anuar Gea, S.H., M.H. NIP. 197307121993031001	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Yulidarman Zandrato, S.H. NIP. 198310272006041009	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Edwin Ricardo M. Purba,SE NIP. 198602092009121007	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Berlianna Seniwati Laia, S.H. NIP. 198403312009042006	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	Anggota
11.	Wilpen F. Simanungkalit, S.Kom NIP. 198511092009121001	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Anggota
12.	Soraya Rizna Afrijal, S.H. NIP. 199110032014032004	Staff Kepaniteraan Hukum	Operator

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 05 Desember 2018
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ✓

MERY DONNA T. PASARIBU, S.H., M.H.
NIP. 1977001231999032002

LAPORAN JENIS PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI WILAYAH HUKUM PT. MEDAN

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
 TAHUN PELAPORAN : 02 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018

A. PERDATA GUGATAN

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	PTS	SISA THN 2018	MINUTASI		
							SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TANAH	1	2	3	2	1	0	2	0
2	PERUMAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HUTANG PIUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PERSETUJUAN KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SEWA MENYEWAWA	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JUAL - BELI	0	0	0	0	0	0	0	0
8	WARISAN	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERCERAIAN	4	24	28	22	6	0	22	0
10	HARTA PERKAWINAN	0	1	1	1	0	0	1	0
11	GADAI/HIPOTIK	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PERSEROAN	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PERSEKUTUAN ADAT	0	0	0	0	0	0	0	0
14	SURAT BERHARGA	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ASURANSI	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KEPAILITAN	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEREK	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENYALAHGUNAAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN	0	0	0	0	0	0	0	0
21	LAIN - LAIN	13	23	36	29	7	0	29	0
	JUMLAH	18	50	68	54	14	0	54	0

B. PERDATA GUGATAN SEDERHANA

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	PTS	SISA THN 2018	MINUTASI		
							SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WANPRESTASI	0	1	1	1	0	0	1	0
	JUMLAH	0	1	1	1	0	0	1	0

C. PERDATA PERMOHONAN

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	PTS	SISA THN 2018	MINUTASI		
							SISA LALU	JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)	0	2	2	2	0	0	2	0
2	WALI PENGAMPU	0	3	3	3	0	0	3	0
3	IJIN JUAL	0	11	11	11	0	0	11	0
4	GANTI NAMA	0	8	8	8	0	0	8	0
5	AKTE LAHIR	0	210	210	210	0	0	210	0
6	PENGESAHAN PERKAWINAN	0	1	1	1	0	0	1	0
7	LAIN - LAIN	0	22	22	22	0	0	22	0
	JUMLAH	0	257	257	257	0	0	257	0

D. UPAYA HUKUM

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	DIKRIM	SISA THN 2018
1	BANDING	3	11	15	12	2
2	KASASI	1	7	8	8	0
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	1	1	1	0

NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	EKSEKUSI	19	4	23	3	20

NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	SOMASI	0	0	0	0	0

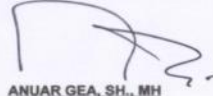
NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	KONSIGNASI	1	0	1	0	1

MENGETAHUI,
An. PANITERA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
WAKIL PANITERA



VICTORMAN T. MENDROFA, S.H.
NIP. 197903092000121002

GUNUNGSITOLI, 2 Januari 2019
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
PANITERA MUDA PERDATA



ANUAR GEA, SH., MH
NIP. 197307121993031001

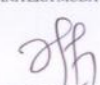
**LAPORAN JENIS PERKARA PIDANA
PENGADILAN NEGERI WILAYAH HUKUM PT.MEDAN**

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
TAHUN PELAPORAN : JANUARI s.d. 31 DESEMBER 2018

NO	JENIS TINDAK PIDANA	SISA TAHUN 2017	MASUK TAHUN 2018	JMLH TERDAKWA		ANAK2	PUTUS	SISA AKHIR THN.2018	MINUTASI			
				JMLH PRIA	JMLH WANITA				SISA LALU	JMLH SUDAH	JMLH BELUM	
1	Kejahatan terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejahatan terhadap marabhat Presiden/Wakil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejahatan terhadap negara Sahabat dan terhadap kepala Negara Sahabat beserta wakilnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban kewarganegaraan dan hak kewarganegaraan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kejahatan terhadap ketertiban umum	4	22	26	28	2	0	24	2	0	24	0
6	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum hasil orang atau barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejahatan terhadap pengasa umum	1	1	2	0	0	0	2	0	0	2	0
8	Sampah/kelebihan jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pemalsuan uang	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
10	Pemalsuan materai/merk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pemalsuan surat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejahatan terhadap asal usul perlawanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejahatan kesucilaan	1	1	2	1	0	0	2	0	0	2	0
14	Kejahatan perjudian	2	18	20	23	2	0	20	0	0	20	0
15	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penghinauan	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
17	Membuka rahasia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	1	13	14	14	1	0	14	0	0	14	0
19	Kejahatan terhadap nyawa	4	16	20	16	0	0	18	2	0	18	0
20	Penganiayaan	2	32	34	31	1	0	31	3	0	31	0
21	Menyebabkan mati-buka karena alpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pencurian	5	28	33	31	1	0	31	2	0	31	0
23	Pemerasan dan pengancaman	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
24	Penggelapan	0	3	3	4	0	0	2	1	0	2	0
25	Penipuan	1	2	3	1	1	0	3	0	0	3	0
26	Merugikan penitang atau orang yang berhak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Menghancurkan atau merusak barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kejahatan jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kejahatan pelayaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Peradahan	0	3	3	3	0	0	3	0	0	3	0
31	Kejahatan pencetakan dan percetakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Tindak Pidana Ekstremis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tindak Pidana Senjata Api/sajam	2	6	8	6	0	0	8	0	0	8	0
35	Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika	3	60	63	59	3	0	63	0	0	63	0
36	Tindak Pidana Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tindak Pidana Imigrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tindak Pidana Deviasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tindak Pidana Koneksitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Perindungan Salai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2	7	9	6	2	0	9	0	0	9	0
43	Pengalihan Hak Asasi Manusia (HAM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Perikanan (Illegal Fishing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pengalihan Anak	1	11	12	0	0	14	12	0	0	12	0
46	Perindungan Anak	1	24	25	27	0	0	24	1	0	24	0
47	Kebutaan (Illegal Logging)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pencucian Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Terrorisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Perdagangan Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Hak Asas Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Pasulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Pilpres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Pirkada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	BBM Tanpa Izin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Perkara PRAPID	0	7	7	7	0	0	7	0	0	7	0
58	Perkara Lalu Lintas	1	7	8	7	0	0	8	0	0	8	0
59	Informasi dan Transaksi Elektronik	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0
60	Tindak Pidana Lain	0	6	6	6	0	0	6	0	0	6	0
	JUMLAH	33	270	303	272	14	14	292	11	0	292	0

MENGETAHUI,
Aa PANTERA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
Wakil Ketua

VICTORMAN T. MENDROFA, SH
NIP. : 19790309 200012 1 002

GUNUNGSITOLI, 02 JANUARI 2019
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
PANTERA MUDA PIDANA

YULIDARMAN ZENDRATO
NIP. 19810727 200604 1 009.-

NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	EKSEKUSI	19	4	23	3	20

NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	SOMASI	0	0	0	0	0

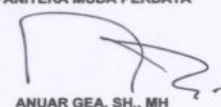
NO.	URAIAN	SISA THN 2017	MASUK THN 2018	JLH	DILAKSANAKAN	SISA THN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	KONSIGNASI	1	0	1	0	1

MENGETAHUI,
 An. PANITERA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
 WAKIL PANITERA



VICTORMAN T. MENDROFA, S.H.
 NIP. 197903092000121002

GUNUNGSITOLI, 2 Januari 2019
 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
 PANITERA MUDA PERDATA



ANUAR GEA, S.H., MH
 NIP. 197307121993031001